

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Nur Farida Liyana ¹, Arief Budi Wardana ², Rizqi Haniyah ^{3*}, Eko Susanto⁴

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan; e-mail: faridaliyana@pknstan.ac.id;

² Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan; e-mail: wardana.arief@pknstan.ac.id;

³ Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan; e-mail rizqi.haniyah@pknstan.ac.id;

⁴ Direktorat Jenderal Pajak; Kementerian Keuangan.

* Korespondensi: e-mail: rizqi.haniyah@pknstan.ac.id

Diterima: 06/06/2024; Review: 21/06/2024; Disetujui: 30/06/2024

Cara sitasi: Liyana, Wardana, Haniyah, Susanto. 2024. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 07 (no 1): halaman.1-14

Abstrak: Desentralisasi fiskal menyebabkan pemisahan kewenangan pemajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan penerimaan sektor perpajakan tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat. Terdapat penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh pajak daerah pada kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Indonesia. Objek yang diteliti adalah kabupaten dan kota di Indonesia yang berjumlah 504 kabupaten/kota sepanjang 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018 s.d. 2021. Analisis dilakukan dengan regresi data panel. Pajak daerah menjadi variabel bebas, kemudian ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio sebagai variabel terikat. Selain pajak daerah, penelitian ini juga menggunakan belanja modal, jumlah penduduk, dan PDRB sebagai variabel kontrol.

Hasil analisis menunjukkan kinerja pengumpulan pajak daerah dalam rentang tahun 2018 – 2021 belum memberikan efek yang diharapkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pajak daerah belum dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD maupun APBD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan semakin efektif, efisien dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan; Pajak Daerah; Gini Ratio; PDRB; Jumlah Penduduk.

Abstract: Fiscal Decentralization means that taxation is not only the authority of the central government. There are tax revenues collected by local governments. The aim of this research is to examine the relationship between local taxes and income inequality in districts and cities in Indonesia. The objects studied were district and cities in Indonesia, totaling 504 districts/cities over 4 years, from 2018 to 2010. Analysis was carried out using panel data regression. Local taxes are the independent variable, while the Gini Ratio, which is a measure of inequality, is the dependent variable. This research also uses capital expenditure, population, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) as control variables. The analysis result shows that the performance of local tax collection in the 2018 - 2021 period has not had the expected effect in reducing income inequality. The research illustrated that regional taxes have not been able to function as the main driver in reducing the income inequality in districts/cities in Indonesia. This is correlated with the fact of the low contribution of local taxes in Local Own-source Revenue (PAD) and Local Government Budget (APBD). This research is expected to help the government and provide input to make local tax policies more effective, efficient and can reduce income inequality in the regions.

Keywords: income inequality; local tax; gini ratio; GDP; population.

1. Pendahuluan

Kesenjangan ekonomi dapat diukur dengan ketimpangan pendapatan atau biasa disebut *income inequality*. Ketimpangan pendapatan mengacu pada seberapa tidak merata distribusi pendapatan di seluruh populasi [Kopp, 2023]. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan; terhambatnya pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan investasi; serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan masalah sosial pada masyarakat [Polacko, 2021]. Dijelaskan pula oleh Aiyar dan Ebeke [2020] bahwa ketimpangan pendapatan tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang paling tinggi yang pada akhirnya akan berdampak buruk di masa depan.

Haya et al. [2022] juga menguraikan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak buruk antara lain terjadinya inefisiensi ekonomi dan rusaknya stabilitas sosial seperti munculnya berbagai konflik dalam masyarakat, terjadinya perpecahan, protes atau demonstrasi. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti et al. [2022] menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *income inequality* atau ketimpangan pendapatan dengan tingginya tindakan kriminal. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi ketidakmerataan pendapatan dengan redistribusi pendapatan tersebut.

Ketimpangan pendapatan adalah keadaan ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah [Haya et al., 2022]. Ketimpangan pendapatan akan mengakibatkan ketimpangan kekayaan atau distribusi kekayaan yang tidak merata. Untuk itu diperlukan sebuah ukuran agar ketimpangan pendapatan ini dapat diukur dengan baik. Dari seluruh ukuran ketimpangan ekonomi, *Gini Ratio* (Indeks Gini) merupakan ukuran ketimpangan yang paling populer yang dirancang oleh Corrado Gini dari Italia [Mukhopadhyay dan Sengupta, 2021].

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio dengan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan, sedangkan data pengeluaran tersebut diperoleh dari hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas). Hasil pengukuran gini ratio untuk ketimpangan pengeluaran adalah antara 0 dan 1 [Khoirudin and Musta'in, 2020]. Semakin mendekati nilai 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin yang tinggi.

Berdasarkan Gambar 1 diperoleh gambaran angka *gini ratio* dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 (semester 1). Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir angka ketimpangan Indonesia berada pada angka tertinggi yaitu 0.388 pada tahun 2023 semester 1. Di lain pihak jumlah penduduk miskin pada semester 1 tahun 2023 justru merupakan jumlah penduduk miskin terendah selama 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini berarti kemiskinan semakin dalam dan yang kaya semakin kaya. Selain itu, juga berarti ketimpangan pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya semakin tinggi.

Gambar 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Per Semester dan *Gini Ratio*
Semester 1 Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah penulis)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat, maka penting untuk melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan pendapatan tersebut. Dengan demikian selanjutnya dapat diupayakan agar distribusi pendapatan lebih merata dalam masyarakat. Beberapa penelitian telah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Alamanda [2021] menjelaskan bahwa belanja pemerintah misalnya berupa penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, dan bantuan tunai, memiliki korelasi yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang juga artinya mengurangi ketimpangan tersebut. Selain itu, *human capital* (pendidikan dan pekerjaan) serta faktor makro ekonomi seperti inflasi juga memiliki dampak terhadap ketimpangan pendapatan [Suhendra et al., 2020]. Selain mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan, pemerintah juga perlu melakukan intervensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang tidak merata agar efisiensi sosial dapat tercapai [Ariani, 2023].

Redistribusi pendapatan adalah pemerataan pendapatan dengan transfer dari yang kaya ke yang miskin yang bersumber dari dana pajak [Hidayat dan Karimi, 2020]. Hal ini diungkapkan juga oleh Mu'awanah dan Panjawa [2022] yang menyatakan bahwa redistribusi pendapatan melalui dana pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah dibuktikan oleh Sihalo [2020], Rambe and Febriani [2020] Lesfandra [2021]. Semakin banyak penerimaan pajak, semakin banyak uang yang dimiliki pemerintah untuk mendanai belanja infrastruktur, bantuan sosial, hibah, pendidikan, dan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, dengan demikian, dapat mengurangi ketimpangan pendapatan [Alamanda, 2021].

Seperti yang kita ketahui Indonesia menganut asas desentralisasi fiskal dimana urusan pajak juga dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Nashrullah [2023] menyatakan bahwa adanya desentralisasi fiskal telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah. Untuk itu, penghimpunan pajak daerah tentunya akan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Pajak daerah hanya merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pajak daerah, terdapat PAD lainnya yaitu retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah [Finuliyah and Khusaini, 2022]. Selain PAD, sebagian pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat juga akan disalurkan ke pemerintah daerah melalui transfer.

Secara teori, Liyana et al. [2022] menyimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan mampu untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Lebih lanjut hasil penelitian Drieandita dan Santoso [2023] menunjukkan bahwa fungsi pajak untuk mendistribusi pendapatan telah bekerja secara efektif untuk pemerataan atau mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk redistribusi pendapatan dalam rangka mengurangi kemiskinan seperti yang diungkapkan oleh Akhadi [2022] dan Matitaputty et al. [2021]. Fungsi tersebut dapat terwujud dengan mengenakan pajak secara progresif.

Namun demikian, fungsi pajak untuk distribusi pendapatan tidak selalu berjalan dengan baik. Hasil penelitian Fahmi [2019] menunjukkan hal yang berbeda. Penerimaan pajak, dalam hal ini pajak penghasilan, dan *gini ratio* memiliki hubungan positif, yang berarti pajak belum mampu menurunkan kesenjangan karena pajak hanya efektif berperan sebagai alat untuk pengumpul penerimaan negara [Fahmi, 2019]. Hasil yang sejalan juga

diperoleh jika ditarik ke proksi daerah, bahwa fungsi redistribusi pendapatan oleh pajak tidak dapat mengatasi ketimpangan pendapatan di tingkat regional. Sari dan Qibthiyah [2022] mendapatkan hasil bahwa sistem dan struktur perpajakan Indonesia saat ini belum mampu berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada level provinsi di Indonesia. Novitasari [2022] yang meneliti pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Kalimantan Selatan, mendapati bahwa penerimaan pajak daerah belum dapat diandalkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan perbedaan antara teori dan hasil penelitian terkait hubungan antara pajak dan *income inequality*, maka penelitian ini berupaya memperdalam penggalian peran pajak ini apakah mampu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini fokus mengkaji kaitan antara pajak daerah dengan gini rasio kabupaten/kota di Indonesia. Objek yang diteliti adalah 504 kabupaten/kota di Indonesia, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018 s.d. 2021.

Untuk itu, penelitian ini diberi judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Selain pajak daerah, penelitian ini juga menggunakan belanja modal, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel kontrol.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diharapkan mampu untuk mengukur hubungan antara variabel. Kesenjangan ekonomi yang terwakili dengan koefisien gini pada level kabupaten/kota dipilih sebagai variabel dependen. Adapun variabel independen pada penelitian ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Keberadaan pemisahan kewenangan pemajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan penerimaan sektor perpajakan tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat. Terdapat sisi penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu terdapat kontrol variabel yang berpotensi mempengaruhi kesenjangan ekonomi, yaitu belanja pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta jumlah penduduk.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data yang dianalisis adalah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data didapatkan dari institusi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (DJPK).

Metode Analisis Data

Penelitian ini terutama untuk menguji hipotesis bahwa Pajak Daerah (PD) berpengaruh negatif signifikan terhadap Gini Ratio (GR) pada kabupaten/kota di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel dengan menggunakan STATA untuk menguji apakah hipotesis yang dibangun diterima atau tidak. Model yang dibangun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketimpangan pendapatan, penerimaan pajak, dan faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnPD_{it} + \beta_2 LnGDP_{it} + \beta_3 LnBM_{it} + \beta_4 LnJP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

GR	= Koefisien gini ratio Kabupaten/Kota
PD	= Total penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota
GDP	= Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
BM	= Belanja Modal Kabupaten/Kota
JP	= Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup kurun waktu 4 tahun dari 2018 sampai dengan 2021. Dengan jumlah data sebanyak 2016 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, maka kabupaten/kota yang diobservasi adalah 504. Apabila dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Kemendagri [2017] yang berjumlah 514, maka terdapat 10 kabupaten/kota yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Ketidaktersediaan data yang lengkap pada 10 wilayah tersebut menjadikan jumlah observasi tidak meliputi seluruh populasi Kabupaten/kota di Indonesia. Walaupun demikian, jumlah sampel penelitian ini telah cukup mewakili karena mencakup 98% dari total populasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Kab_Kota	2016	377.75	262.7096	1	1008
Kode	0				
Provinsi	0				
Kabupaten	0				
Tahun	2016	2019.5	1.118311	2018	2021
GDP	2016	21751.46	85711.97	141	1856076
JP	2006	533039.4	768512.1	11840	1.06e+07
GR	2016	.3230413	.0461689	.187	.508
PD	2016	1.89e+11	1.64e+12	1763144	4.03e+13
BM	2016	2.99e+11	4.78e+11	3.27e+10	1.41e+13
LnJP	2006	12.62666	1.044112	9.379239	16.17728
LnPD	2016	24.18869	1.614351	14.38261	31.32733
LnBM	2016	26.19253	.5833622	24.21184	30.27851
LnGDP	2016	9.074378	1.219268	4.94876	14.43398
simpan_dat~1	2006	1.35e-11	.0454529	-.1363796	.1850611

Sumber: diolah penulis

Selanjutnya, nilai koefisien gini (GR) sebagai variabel dependen berada dalam rentang antara 0,187 sampai 0,508. Koefisien gini terendah berada di Kabupaten Nduga pada tahun 2020, sementara nilai tertinggi dimiliki kabupaten Buton Tengah pada tahun 2018. Adapun nilai rata-rata koefisien gini dalam periode penelitian ini sebesar 0,323. Beralih ke nilai variabel independen yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pajak daerah. Pendapatan pajak daerah terbesar dikumpulkan oleh DKI Jakarta pada tahun 2019 yang mencapai Rp40,298 triliun. Sementara pendapatan pajak daerah terendah ada di Kabupaten Maybrat yang hanya mencapai Rp1.763.144 di tahun 2020. Variasi yang cukup besar antar data yang diobservasi juga terjadi pada variabel kontrol yaitu Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, dan belanja modal. Oleh karena itu, variabel independen dan variabel kontrol perlu diubah dalam bentuk logaritma natural (Ln).

3.2. Analisis Regresi

Setelah dilakukan pengecekan asumsi klasik regresi dan kemudian dilakukan permodelan dengan Generalized Least Square (GLS), maka kemudian dilakukan pemilihan model terbaik regresi panel. Ada 3 (tiga) jenis model regresi panel yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pengujian untuk pemilihan model terbaik dilakukan sebagai berikut:

Uji Chow untuk menguji CEM dan FEM

Hipotesis yang dibangun dalam uji Chow sebagai berikut:

H0 = terima FEM sebagai model terbaik

H1 = tolak FEM sebagai model terbaik

Gambar 1

$F(1004, 997) = 8.32$ $Prob > F = 0.0000$
--

Sumber: diolah penulis

Gambar 1. Hasil Uji Chow

Berdasarkan uji chow diperoleh probabilitas F sebesar 0.0000 sebagaimana Gambar 1, dimana hasil tersebut kurang dari alpha 0.05 sehingga kesimpulan adalah terima H0 yang artinya FEM dipilih sebagai model terbaik.

Hausman Test FEM dan REM

Tahap selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk memilih FEM dan REM dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 = terima FEM sebagai model terbaik

H1 = tolak FEM sebagai model terbaik

Diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dimana hasil probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga kesimpulan adalah gagal tolak Ho yang berarti bahwa FEM merupakan model yang lebih baik dari REM.

```

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

      chi2(4) = (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)
            =          56.03
      Prob>chi2 =          0.0000
  
```

Sumber: diolah penulis

Gambar 2. Hasil Uji Hausman

Meskipun sudah jelas bahwa FEM lebih baik dari CEM dan FEM lebih baik dari REM, sebenarnya tidak perlu dilakukan uji ketiga yaitu antara REM dan CEM karena FEM merupakan model terbaik. Namun untuk lebih meyakinkan penulis melakukan uji pembuktian yang ketiga yaitu Breusch and Pagan Lagrangian Test.

Breusch and Pagan Lagrangian Test (REM dan CEM)

Hipotesis Breusch and Pagan Lagrangian Test sebagai berikut:

H0 = terima REM sebagai model terbaik

H1 = tolak REM sebagai model terbaik

```
Test:      Var(u) = 0
           chibar2(01) =    793.75
           Prob > chibar2 =    0.0000
```

Sumber: diolah penulis

Gambar 3 Hasil Uji Breusch and Pagan Lagrangian

Berdasarkan Gambar 3 diperoleh hasil probabilitas 0,0000 dimana kurang dari 0,05 sehingga kesimpulan adalah gagal tolak H0 yaitu REM sebagai model terbaik.

Dari ketiga tes yang telah dilakukan maka kita menggunakan hasil analisis regresi dengan Fixed Effect Model sebagai model terbaik. Berikut adalah hasil regresi yang diperoleh.

```
. xlogit GR LnJP LnGDP LnPD LnBM, fe
-----+-----
Fixed-effects (within) regression           Number of obs   =    2006
Group variable: Kab_Kota                   Number of groups =    1005

R-sq:  within = 0.0462                     Obs per group:  min =     1
        between = 0.0053                    avg           =     2.0
        overall = 0.0025                    max           =     4

                                           F(4,997)       =    12.07
corr(u_i, Xb) = -0.9531                    Prob > F        =    0.0000
```

GR	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnJP	.0046	.0029027	1.58	0.113	-.0010961	.0102961
LnGDP	-.1218954	.0189887	-6.42	0.000	-.1591578	-.0846331
LnPD	.0052225	.0023114	2.26	0.024	.0006868	.0097582
LnBM	.0044188	.0023142	1.91	0.056	-.0001225	.0089601
_cons	1.128381	.1830767	6.16	0.000	.7691207	1.487641
sigma_u	.14607764					
sigma_e	.02105253					
rho	.97965241	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0:      F(1004, 997) =      8.32      Prob > F = 0.0000
```

Sumber: diolah penulis

Gambar 4. Hasil Regresi Data Panel dengan FEM

Berdasarkan Gambar 4 diperoleh informasi bahwa observasi berjumlah 2006 yaitu 504 Kabupaten/Kota selama 4 tahun (2018 s.d 2021). Model secara statistik sudah signifikan dengan p-value 0.000 kurang dari alpha 0.05.

Namun demikian hasil *R-square* cukup kecil yaitu hanya sekitar 4% sehingga dapat menjadi gap untuk penelitian selanjutnya supaya dicari model terbaik dengan variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan derajat *R-square*. Model yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$GR=1.128+0.0046 \text{ LnJP}-0.122 \text{ LnGDP}+0.005 \text{ LnPD}+0,0044\text{LnBM}$$

Berdasarkan model tersebut diperoleh informasi bahwa tanpa adanya variabel penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, GDP, dan Belanja Modal, gini ratio tetap meningkat sejumlah 1.128%.

Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin meningkatkan gini ratio, meskipun secara statistik tidak signifikan. Hal ini cukup dapat diterima, dikarenakan semakin banyak penduduk semakin banyak yang harus diurus oleh pemerintah sehingga kemungkinan ketimpangan sosial akan semakin besar. Firdaus and Hasmarini [2023] juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *income inequality*. Dari hasil regresi yang telah diperoleh, ketika jumlah penduduk naik 1% maka Gini ratio akan naik sebesar 0.0046%. Selanjutnya adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto sudah sesuai dengan hipotesis bahwa semakin tinggi PDRB maka akan memperkecil gini ratio. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Janah [2022] bahwa semakin tinggi PDRB mencerminkan keberhasilan daerah mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal model yang diperoleh adalah dengan peningkatan PDRB sebesar 1% akan menurunkan Gini Ratio sebesar 0.122% dan hasil ini secara statistik sudah signifikan.

Sementara itu, berbeda dengan hipotesis awal bahwa penerimaan pajak akan mempengaruhi ketimpangan secara negatif, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak daerah justru berpengaruh positif terhadap ketimpangan tersebut. Hal menunjukkan bahwa pajak daerah saat ini belum mampu berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Novitasari [2022], Fahmi [2019], serta Sari dan Qibthiyyah [2022]. Berdasarkan model secara statistik variabel pajak daerah signifikan berpengaruh positif terhadap *income*

inequality, dengan penambahan 1% pajak daerah meningkatkan Gini Ratio sebesar 0.005%. Hal ini dimungkinkan karena belanja di daerah masih bergantung pada dana transfer daerah sehingga dimungkinkan ada faktor-faktor transfer daerah yang justru memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan.

Lebih lanjut Belanja Modal yang diprediksi akan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan ternyata juga memiliki dampak positif terhadap Gini Ratio dan secara statistik signifikan. Namun demikian hal ini sesuai dengan penelitian Yasni and Yulianto [2020] yang menyatakan hal yang sama bahwa belanja modal justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dalam model yang dibangun, setiap penambahan belanja modal sebesar 1% akan meningkatkan gini ratio sebesar 0.0044%. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena kemungkinan besar belanja modal yang dilakukan apakah benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

3.3. Pembahasan Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Apabila kita berbicara kondisi ketimpangan pendapatan di suatu daerah, tidak lepas dari seberapa besar upaya pemerintah daerah tersebut dalam menguranginya. Hasil penelitian ini menjadi sesuatu yang unik mengingat keberadaan pajak daerah tidak mampu untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Pajak daerah merupakan salah satu elemen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penelitian [Juliarini, 2020], kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada Kabupaten tidak sebesar kontribusi pada pemerintah daerah yang berbentuk Kota. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, secara rata-rata pemerintah Kota mampu mengumpulkan pajak daerah lebih dari 60 persen dari PAD, sementara pemerintah Kabupaten belum mampu melebihi 40 persen [Juliarini, 2020].

Menarik pula untuk dibahas bahwa sebenarnya kontribusi pajak daerah terhadap APBD pada kabupaten/kota relatif minim, walaupun memang kontribusi pajak daerah di pemerintah Kota masih lebih besar dibanding pemerintah Kabupaten [Juliarini, 2020]. Apabila pajak daerah dan PAD masih belum sepenuhnya mampu membiayai belanja APBD, maka transfer dari pemerintah pusat masih menjadi andalan bagi sebagian pemerintah daerah. Hal ini memunculkan fenomena *flypaper effect* yang menghambat kemandirian fiskal daerah. *Flypaper effect* adalah fenomena dimana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dibandingkan pengoptimalan PAD [Nguyen-Hoang and

Yinger, 2020]. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi rasional karena kemampuan pajak daerah tidak mampu untuk menjadi motor utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia yang menjadi objek penelitian merupakan kelompok negara berkembang. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa negara berkembang relatif lebih mengalami kesulitan dalam melakukan redistribusi fiskal dibandingkan dengan negara maju. Apabila kita bawa ke konteks pemerintah daerah yang mayoritas mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, maka kemampuan untuk melakukan belanja dalam rangka pemerataan ekonomi menjadi terbatas. Ditambah lagi kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak daerah yang relatif terbatas semakin memperburuk mekanisme fungsi pajak daerah dalam meratakan kesejahteraan.

Selanjutnya kita perlu melihat karakteristik dari penerimaan pajak daerah yang dikelola Kabupaten/Kota. Sebagian besar pajak daerah tersebut belum mengakomodir pengenaan pajak secara progresif. Sebagai contoh pajak bumi dan bangunan dimana ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan tarif berjenjang tergantung besaran NJOP. Namun hal ini tidak menjamin bahwa kelompok berpenghasilan tinggi akan dikenai PBB lebih tinggi karena faktor yang diperhitungkan dalam penentuan tarif adalah nilai dari properti yang dimiliki, bukan penghasilan pada tahun pajak tertentu. Adapun jenis pajak daerah selain PBB, pemerintah daerah lebih condong menerapkan tarif tunggal yang membuatnya akan sulit dalam mengenakan pajak progresif. Padahal, jenis pajak yang berpotensi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan adalah pajak yang diberlakukan secara progresif [Eydam and Qualo, 2023].

5. Kesimpulan

Pajak daerah menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi secara penuh. Kinerja pengumpulan pajak daerah dalam rentang 2018 – 2021 belum memberikan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD maupun APBD. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pajak daerah belum dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota di Indonesia. Ternyata kontribusi pajak daerah yang rendah dalam membiayai pengeluaran

pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya fungsi redistribusi fiskal di daerah. Timbulnya *flypaper effect* pada pemerintah daerah menjadi sesuatu yang perlu segera dibenahi agar tercipta kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi. Selain itu, jenis pajak daerah yang sulit memungut pajak secara progresif menjadikan pemerataan kesejahteraan di daerah menjadi kurang optimal melalui skema pajak daerah.

Perlu kerjasama dari berbagai pihak apabila kita menghendaki pajak daerah menjadi solusi dalam menurunkan kesenjangan ekonomi di daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian fiskal di daerah. Selain itu, masyarakat di setiap daerah juga dapat berkontribusi dengan meningkatkan kepatuhan pajak daerah agar pemerintah mendapatkan ruang yang lebih leluasa dalam menjalankan program yang mendukung pemerataan pembangunan.

Pada penelitian ini belum mengakomodir peran pajak pusat dalam mengatasi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Seperti pada bagian pendapatan, jenis pajak yang dapat mengatasi kesenjangan adalah pajak progresif tentunya hal ini sangat sesuai dengan hasil dimana pajak daerah belum mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya perlu untuk menambahkan proxy pajak pusat sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi *income inequality*.

Referensi

- Aiyar S, Ebeke C. 2020. Inequality Of Opportunity, Inequality Of Income And Economic Growth. *World Dev* 136: 105115.
- Akhadi I. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6: 60–71.
- Alamanda A. 2021. The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis from Fifty Countries. *Info Artha* 5: 1–10.
- Ariani. 2023. Distribusi Pendapatan. In: *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Badung, Bali: Infesmedia.
- Drieandita K, Santoso DB. 2023. Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional di Indonesia. *Journal Of Development Economic and Social Studies* 2: 269–276.
- Eydam U, Qualo H. 2023. Income Inequality and Taxes—An Empirical Assessment. *Appl Econ Lett*: 1–8.
- Fahmi A. 2019. Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 6: 39.
- Finuliyah F, Khusaini M. 2022. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 18-28. 1.
- Firdaus A, Hasmarini MI. 2023. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 21: 116–123.

- Haya SF, Fadilah. Tiara, Rahayu S, Nasution J. 2022. Dampak Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1: 55–68.
- Hidayat M, Karimi S. 2020. Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 10: 79–88.
- Janah M. 2022. Analisis Pengaruh Tingkat PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1: 23–43.
- Juliarini A. 2020. Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13: 1–10.
- Kemendagri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017.
- Khoirudin R, Musta'in JL. 2020. Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika* 15: 17.
- Kopp CM. 2023. Income Inequality Definition: Examples and How It's Measured.
- Lesfandra L. 2021. Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 7.
- Liyana NF, Ratnasari GAI, Susanto E. 2022. Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal* 6: 112.
- Matitaputty SJ, Sugiarto A, Christy AAM, Hastuti PR. 2021. Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Perspektif Akuntansi* 3: 253–269.
- Mu'awanah S, Panjawa JL. 2022. Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 19: 46–55.
- Mukhopadhyay N, Sengupta PP. 2021. *Gini Inequality Index. First edition.* | Boca Raton: CRC Press, 2021.: Chapman and Hall/CRC.
- Nashrullah J. 2023. Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. *Primagraha Law Review* 1: 39–56.
- Nguyen-Hoang P, Yinger J. 2020. The Flypaper Effect: Methods, Magnitudes, and Mechanisms. *Journal Of Education Finance* 46: 158–188.
- Novitasari M. 2022. The Effect of Fiscal Policy on Income Inequality in South Kalimantan Province. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Polacko M. 2021. Causes and Consequences of Income Inequality – An Overview. *Stat Politics Policy* 12: 341–357.
- Rambe RA, Febriani RE. 2020. Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3: 57-76.
- Sari D, Qibthiyyah RM. 2022. Tax Revenue and Income Inequality. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 6: 155–172.
- Sihaloho ED. 2020. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive. In *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 22: 202–209.
- Sugiharti L, Esquivias MA, Shaari MS, Agustin L, Rohmawati H. 2022. Criminality and Income Inequality in Indonesia. *Soc Sci* 11: 142.
- Suhendra I, Istikomah N, Ginanjar RAF, Anwar CJ. 2020. Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7: 571–579.
- Yasni R, Yulianto H. 2020. Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi* 4: 39–63.